

SENTRALISASI SIARAN TELEVISI DAN PENGINGKARAN HAK MASYARAKAT ATAS INFORMASI

Dr. Ade Armando, MSc.¹

ABSTRACT

Due to the centralistic broadcasting system, current commercial television stations cannot play a role to empower communities in the process of democratization at the local level. On one hand, the commercial stations that broadcast nationally in Jakarta tend to show Indonesia through a Jakarta perspective. On the other hand, local news footages are predominantly negative events that have no relevance and insignificant to the problems of local communities.

It then becomes a serious problem given the ongoing decentralization in Indonesia today. At the local level, people also need a means of social control so that political power does not concentrate in the hands of authorities in Jakarta. The concern is that there would be misused benefits that are contrary to the welfare of society. The Broadcasting Act 2002 was an effort to break these centralizing tendencies, which mandates the implementation of networked television broadcast system.

Key words : Broadcasting Act (UU Penyiaran),
broadcast system network,
centralization, democratization,

Interact:

Vol. 3, No. 2, Hal. 37 – 50
November, 2014
Prodi Ilmu Komunikasi,
Unika Atma Jaya Jakarta

¹ Penulis adalah ahli komunikasi, pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), serta di beberapa universitas lainnya pada jenjang sarjana maupun pascasarjana. Ia juga pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia periode 2004-2007 dan merupakan jurnalis lepas

1. Pendahuluan

Tulisan ini pada dasarnya berusaha menunjukkan dampak negatif dari sentralisasi pertelevisian komersial di Indonesia terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi tentang lingkungannya dan hak masyarakat atas sarana komunikasi dua arah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan terhadap isi berita, ditunjukkan bahwa akibat sistem yang tersentralisasi, televisi komersial -- yang sebenarnya merupakan media yang paling dominan di Indonesia -- tak dapat menjalankan perannya menjadi kekuatan pengawal demokrasi. Alih-alih, isi siaran berita televisi didominasi oleh informasi yang hanya sedikit memiliki relevansi dengan proses penguatan demokrasi di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

2. Kerangka Pemikiran

2.1 Demokratisasi Media di Indonesia

Sejak jatuhnya Presiden Soeharto, media massa di Indonesia mengalami demokratisasi yang luar biasa. Secara berkelanjutan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di masa Reformasi mengeluarkan rangkaian langkah yang mendukung penguatan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Beberapa contoh di antaranya adalah, antara lain, lahirnya Undang-undang Pers 1999 yang pro-kebebasan pers dan memuat ancaman pidana bagi pihak mana pun yang menghambat kerja wartawan, dihilangkannya kewajiban bagi pers untuk memperoleh Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), ditiadakannya pembatasan halaman dan iklan dalam surat kabar serta dihilangkannya kewajiban bagi wartawan untuk menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia.

Penguatan demokratisasi ini tidak hanya berlangsung di pusat negara, melainkan juga di seluruh Indonesia. Ini ditunjukkan antara lain dengan tumbuhnya media lokal di seluruh Indonesia. Bahkan di sebuah kota kecil seperti Bogor, yang

berjarak hanya 60 kilometer dari Jakarta dan tak memiliki satu pun surat kabar suratkabar di era Soeharto, berdiri sejumlah perusahaan pers lokal. Data menunjukkan bahwa bila pada 1997 jumlah media cetak di Indonesia hanya mencapai 289 penerbitan, itu melonjak menjadi 1.381 pada 1999 dan 1.881 pada 2001 (Davies, 2013).

Pertumbuhan media cetak di berbagai daerah ini merupakan fenomena yang tak terlihat di masa Soeharto. Rezim Orde Baru yang otoriter senantiasa dihantui dengan ketakutan akan penguatan masyarakat sipil, sehingga kebijakan pers di masa itu melarang perkembangan sarana komunikasi politik di berbagai daerah di Indonesia. Kalaupun ada koran daerah, pemerintah memastikan bahwa jumlahnya tak lebih dari satu atau dua per daerah. Begitu Soeharto jatuh, dengan segera aspirasi masyarakat daerah untuk memiliki media lokal terwujud. Meskipun ada banyak juga media lokal tersebut yang akhirnya bangkrut secara ekonomi, namun yang bertahan tetap bisa hadir dengan cukup sehat.

Perkembangan stasiun radio berada di jalur yang agak berbeda. Dalam hal perkembangan di daerah, stasiun radio sejak lama sudah terdesentralisasi. Stasiun radio komersial di luar Jakarta sudah tumbuh sejak awal Orde Baru. Di setiap kota, pemerintah mengizinkan kehadiran stasiun-stasiun lokal yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh manajemen setempat. Pada 1997, tahun terakhir kekuasaan Soeharto, jumlah stasiun radio komersial sudah mencapai 717 sementara pada 2007 jumlahnya meningkat menjadi 'hanya' 845 (Nugroho *et.al*, 2012a).

Namun demikian, dilihat dari perspektif demokratisasi, kehadiran stasiun-stasiun radio lokal tersebut tak berkorelasi dengan keterbukaan politik. Pemerintah memang mengizinkan kehadiran stasiun-stasiun lokal tersebut, namun pada saat yang sama pemerintah menekan stasiun radio komersial untuk hanya menyajikan muatan hiburan dan tidak akan memuat program berita dan politik. Di masa itu stasiun radio

harus merelai siaran berita dari *Radio Republik Indonesia (RRI)* yang merupakan lembaga penyiaran pemerintah. Apalagi, rezim Orde baru, secara cerdas menempatkan putri Presiden Soeharto sebagai ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) yang memungkinkan perilaku stasiun-stasiun radio di berbagai daerah terkendali secara ketat. Dengan demikian, stasiun-stasiun radio lokal di seluruh Indonesia juga tak dapat berperan sebagai sarana komunikasi politik masyarakat.

Di masa Reformasi, kepasifan peran politik radio ini diubah dengan dihilangkannya pelarangan pemuatan berita. Kewajiban relai siaran *RRI* pun dicabut. Di berbagai daerah, stasiun radio lokal pun memberi ruang bagi komunikasi interaktif mengenai persoalan-persoalan setempat. Satu catatan yang pantas ditambahkan adalah dengan hilangnya beragam peraturan yang membatasi, banyak stasiun-stasiun radio lokal yang kemudian bergabung atau dibeli dan menjadi bagian dari jaringan stasiun radio yang dikuasai pemodal besar, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Namun demikian, sebagian besar muatan siaran stasiun-stasiun radio lokal yang menjadi bagian dari jaringan nasional itu tetaplah bersifat lokal.

Desentralisasi media ini yang tidak terjadi dalam industri televisi yang sebenarnya memiliki pertumbuhan ekonomi sangat pesat. Pada dasarnya yang mendominasi apa yang disaksikan pemirsa di seluruh Indonesia adalah siaran yang datang secara langsung dari 10 stasiun televisi *free-to-air* yang berada di Jakarta yang dapat melakukan siaran secara langsung ke seluruh Indonesia. Sepuluh stasiun nasional tersebut adalah: *RCTI*, *SCTV*, *MNCTV*, *Indosiar*, *ANTV*, *TransTV*, *Trans-7*, *Metro TV*, *Global*, dan *TV-One*.

Stasiun televisi komersial pertama di Indonesia, *RCTI*, di awal kelahirannya (1989) sebenarnya beroperasi sebagai stasiun televisi lokal di Jakarta. Demikian pula dengan *SCTV* yang berdiri sebagai stasiun televisi Surabaya. Namun karena tekanan

yang terus-menerus dilakukan, para pemilik stasiun televisi yang berada dalam lingkaran terdekat istana, pemerintah Orde Baru kemudian mengubah kebijakan tentang sistem penyiaran tersebut sehingga semua stasiun televisi komersial yang lahir di masa Orde Baru dapat melakukan siaran langsung ke seluruh Indonesia. Di sisi lain, pemerintah Soeharto juga menetapkan peraturan yang melarang pendirian stasiun televisi komersial di luar Jakarta. Pada gilirannya, lima stasiun televisi komersial yang lahir di masa awal pemerintahan BJ Habibie (1998-1999) terkena imbas dari rangkaian peraturan Orde Baru tersebut: mereka berdiri di Jakarta dan melakukan siaran langsung ke seluruh Indonesia (Armando, 2011).

Kesepuluh stasiun tersebut bersiaran tanpa mengembangkan jaringan stasiun-stasiun televisi lokal. Sebagai contoh, siaran stasiun televisi terbesar *RCTI* dapat menjangkau penonton di daerah timur Indonesia, Papua, tanpa harus melalui perantara stasiun televisi lokal yang berafiliasi dengan *RCTI* di Papua. Isi siaran *RCTI* dapat menjangkau Papua melalui satelit yang kemudian dipancar ulang melalui stasiun transmisi. Implikasinya, seluruh siaran yang disaksikan penonton di Papua sama dengan yang disaksikan penonton di Jakarta dan kota-kota lainnya. Karena bersifat langsung, isi siaran *RCTI* tidak memuat siaran lokal yang berbeda-beda di setiap daerah.

Untuk melengkapi gambaran, penonton Indonesia memang tak hanya menikmati siaran yang datang dari 10 besar stasiun televisi tersebut. Sejak akhir dekade 2000-an, juga terdapat sejumlah jaringan televisi namun dengan skala bisnis jauh lebih terbatas, antara lain: *Kompas TV*, *RTV*, *SINDO TV*, *DAAI TV*, *JPMC*, *CTV* dan *NET*. Berbeda dengan 10 stasiun televisi besar tadi, jaringan yang baru berdiri sekitar lima tahun terakhir ini mengembangkan atau memiliki kerjasama dengan televisi-televisi lokal. Siaran dari pusat jaringan (sebagian terbesar di Jakarta, walau ada juga berkantor pusat di Surabaya dan Denpasar) ini tidak menjangkau penonton di seluruh Indonesia,

melainkan terbatas di daerah-daerah tertentu saja. Umumnya stasiun yang menjadi stasiun afiliasi jaringan memuat pula siaran lokal yang diproduksi di daerah tersebut, terutama acara berita.⁶

Tentu saja, di luar stasiun-stasiun televisi komersial itu terdapat satu stasiun televisi publik, *TVRI*. Stasiun ini memiliki daya jangkau siaran paling luas dan bisa mencapai daerah-daerah pinggiran bahkan daerah-daerah perbatasan yang sedikit penduduknya. *TVRI* bersiaran dengan sistem jaringan. Stasiun-stasiun *TVRI* regional berkembang dengan didanai anggaran belanja negara. Masalahnya, karena berbagai alasan kesejarahan, *TVRI* saat ini sebenarnya lebih berposisi sebagai ‘pelengkap’ bagi stasiun-stasiun televisi komersial raksasa nasional.

Yang ingin ditunjukkan dengan perkembangan televisi komersial berjaringan dan *TVRI* tersebut adalah bahwa walau keduanya ada namun itu pada dasarnya tidak (belum) menggoyahkan dominasi 10 stasiun televisi utama tersebut. Dengan demikian, berbeda dengan media cetak dan radio, pertelevisian di Indonesia cenderung tersentralisasi. Dilihat dari demokratisasi Indonesia, ini adalah sebuah persoalan serius mengingat televisi adalah media yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Data *Indonesia Media Guide 2010* menunjukkan bahwa penetrasi televisi mencapai 93%, sementara penetrasi radio hanya mencapai sekitar 40%, dan surat kabar sekitar 25% penduduk.

Secara hukum, pola siaran televisi komersial yang tersentralisasi ini sebenarnya bertentangan dengan muatan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Sejalan dengan semangat demokratisasi di masa awal Reformasi, UU Penyiaran 2002

mengandung semangat desentralisasi siaran yang terwujud dalam ketetapan yang menyatakan bahwa setiap lembaga penyiaran harus memilih salah satu di antara dua format yang tersedia: menjadi stasiun lokal atau stasiun berjaringan. Kendati memang tak ada ketentuan lebih terperinci mengenai stasiun berjaringan yang dimaksud, UU tersebut jelas tidak lagi memperkenankan kehadiran stasiun televisi nasional sebagaimana yang dikenal di era Orde Baru.

Namun sejarah mencatat, amanat UU Penyiaran itu tak pernah berhasil diwujudkan sepanjang era pasca Soeharto. Dalam 10 tahun pemerintahannya (2004-2014), pemerintah Soesilo Bambang Yudhoyono memang berulang kali mengeluarkan peraturan yang mengesankan adanya semangat untuk menegakkan ketetapan tentang sistem televisi berjaringan, namun implementasi rangkaian ketetapan itu pun tak pernah sungguh-sungguh dilakukan (Armando, 2011)⁷. Implikasinya, pada saat tulisan ini disusun menjelang berakhirnya masa pemerintahan SBY, siaran nasional secara langsung oleh 10 stasiun televisi di Jakarta tersebut tetap mendominasi apa yang disaksikan masyarakat di seluruh Indonesia.

2.2 Televisi dan Demokratisasi

Sentralisasi siaran ini memiliki implikasi multi-sisi. Secara ekonomi dan bisnis, pola siaran terpusat itu mematikan peluang bisnis pertelevisian di luar Jakarta. Uang iklan yang mengalir ke stasiun televisi di Indonesia pada 2013 mencapai lebih dari Rp 85 triliun. Namun uang iklan televisi yang dibelanjakan oleh dunia usaha ini hanya berputar di sekitar 10 stasiun televisi di Jakarta tersebut. Di luar Jakarta, lapangan kerja di dunia pertelevisian hampir-hampir

⁶ Selain itu, terdapat pula stasiun-stasiun televisi lokal independen berskala kecil. Dalam perkembangan terakhir, stasiun-stasiun kecil ini pun menjadi bagian dari jaringan stasiun televisi yang lebih besar, baik karena diakuisisi ataupun melalui kerjasama manajemen.

⁷ Misalnya pada Desember 2007, pemerintah menerbitkan Perkominfo No. 32/2007 tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi yang menetapkan bahwa pelaksanaan penyesuaian Izin penyelenggaraan Penyiaran dilaksanakan bertahap paling lambat sampai 28 Desember 2009. Tapi penyesuaian IPP yang diperintahkan nyatanya tak pernah dijalankan dengan sungguh-sungguh; tapi ketetapan ini tak pernah dipatuhi secara konsisten.

tak ada, demikian pula kecil peluang bagi kelahiran lembaga periklanan, rumah produksi atau lembaga pendukung pertelevisian lainnya.

Dilihat dari perspektif sosial-budaya, keragaman budaya Indonesia hanya memiliki peluang kecil untuk bisa hadir di layar televisi yang dikuasai 10 stasiun Jakarta tersebut. Industri kreatif di berbagai daerah sulit mendapat sarana promosi melalui televisi. Homogenisasi budaya menjadi keniscayaan.

Satu implikasi penting lain dari sentralisasi siaran ini adalah hilangnya potensi media televisi sebagai sebuah *'public sphere'* yang dibutuhkan bagi demokratisasi di Indonesia – dan aspek ini yang menjadi fokus tulisan ini.⁸

Asumsi dasarnya adalah, media massa seharusnya menjadi sarana penyedia informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk mengambil keputusan mengenai lingkungannya. Dalam demokrasi, media massa menempati peran vital karena media seharusnya menjadi semacam 'anjing pemantau' yang terus mengawasi gerak-gerik mereka yang berkuasa. Tanpa informasi yang cukup mengenai apa yang terjadi di belakang dinding pemerintah, parlemen, lembaga pengadilan dan lembaga-lembaga negara lainnya, akan sulit bagi masyarakat untuk menilai kualitas kerja mereka yang mengatur negara tersebut.

Media massa juga diharapkan menjadi sarana yang bisa mempertemukan beragam pemangku kepentingan dalam demokrasi. Komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat yang diperintah idealnya bisa difasilitasi oleh media massa. Begitu pula, media massa dapat menjadi sarana diskusi dan debat yang sehat yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan.

⁸ Public sphere dalam hal ini adalah 'sebuah ruang di mana beragam anggota masyarakat secara bebas berinteraksi dan membicarakan persoalan-persoalan bersama di luar institusi publik formal' (Littlejohn dan Foss, 2009: 300)

Dalam kasus Indonesia yang wilayahnya sedemikian luas, apa yang dibutuhkan masyarakat di setiap daerah bukan hanya informasi mengenai pemerintah pusat namun juga pemerintah di masing-masing daerah. Lingkungan terdekat masyarakat adalah daerah di mana mereka tinggal. Karena itu masyarakat di setiap daerah membutuhkan sarana untuk berbicara antar-warga di daerah setempat, berkomunikasi dengan para penyelenggara pemerintah di daerah setempat, dan memiliki informasi tentang apa yang dilakukan penyelenggara negara di daerah setempat.

Halaman-halaman depan surat kabar di Indonesia lazim dipenuhi dengan informasi-informasi mengenai korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kelambanan atau keburukan kinerja pemerintah, parlemen, polisi, militer, dan lembaga kehakiman. Tradisi *'muckcracker'* ini dijalankan oleh media-media besar di Jakarta maupun koran-koran daerah termasuk yang merupakan bagian dari jaringan media yang berpusat di kota besar. Stasiun radio lokal pun lazim memberi kesempatan bagi para pendengar untuk menelepon dan bicara secara langsung tentang persoalan-persoalan yang dihadapi di daerah lingkungannya, atau juga mengomentari narasumber, yang kadang adalah pejabat atau anggota parlemen setempat.

Hal ini yang sulit diwujudkan dalam sistem pertelevisian sentralistik seperti yang berlangsung selama ini. Isi berita, laporan mendalam, atau *talkshow* yang disaksikan masyarakat seluruh Indonesia di televisi-televisi utama pada dasarnya tidak ditentukan oleh masyarakat di setiap daerah bersangkutan. Yang disaksikan masyarakat setiap daerah adalah apa yang dipancarkan dari Jakarta. Dalam berita dari Jakarta itu tentu saja ada berita tentang daerah, namun yang ditentukan oleh redaksi di Jakarta.

Yang menentukan apa yang dianggap penting oleh masyarakat Indonesia adalah orang-orang di Jakarta. Karena itu, masyarakat daerah sulit untuk menyaksikan diri mereka dan persoalan-persoalan mereka di layar televisi.

Dalam sistem siaran yang sentralistik saat ini, kantor redaksi masing-masing stasiun televisi hanya ada di Jakarta. Di daerah, yang ada hanyalah kantor-kantor biro atau sekedar kontributor terikat atau lepas yang secara rutin mengirimkan berita tentang daerah masing-masing ke Jakarta. Di daerah luar Jakarta, masyarakat tidak dapat secara langsung menyaksikan siaran berita tentang daerah masing-masing dari stasiun-stasiun televisi besar tersebut. Mereka juga tak dapat menyaksikan acara wawancara dengan pejabat, anggota parlemen, aparat keamanan pejabat negara atau para pakar di universitas di daerah masing-masing. Tentu saja, mereka pun tak dapat menjadi penelepon yang bisa terlibat dalam diskusi dengan narasumber yang membicarakan persoalan-persoalan di daerah masing-masing.

Dalam sistem siaran sentralistik ini, para jurnalis di berbagai daerah mengirimkan beritanya terlebih dahulu ke kantor redaksi di Jakarta yang akan menentukan mana yang pantas untuk disiarkan pada publik nasional. Dalam kondisi ini, peluang bagi setiap berita yang dikirim dari daerah untuk bisa termuat dalam program berita sebenarnya sangat terbatas. Setiap berita daerah harus bersaing dengan puluhan berita daerah lain serta juga dengan berita-berita Jakarta yang seringkali nilai beritanya dianggap lebih tinggi karena menyangkut kalangan yang menentukan jalannya penyelenggaraan negara atau kalangan yang memang dikenal oleh publik nasional di bidangnya masing-masing.

Para jurnalis di daerah paham bahwa redaksi Jakarta hanya akan meloloskan berita-berita yang dianggap menarik oleh khalayak di banyak daerah dan bukan yang hanya dianggap penting oleh satu-dua daerah tertentu.

Satu hal yang juga penting dicatat adalah fakta bahwa para wartawan di daerah itu pada umumnya adalah pekerja lepas – yang lazim disebut ‘kontributor’ -- yang hanya akan dibayar seandainya beritanya dimuat. Karena itu bagi para wartawan lokal ini adalah penting untuk mencari berita yang

memiliki daya tarik kuat untuk mengalahkan berita dari daerah-daerah lain. Dalam kondisi semacam ini, salah satu resep yang dianggap ampuh agar berita yang dikirimkan dimuat adalah dengan berita yang penuh ‘darah’: kecelakaan, konflik, kriminalitas, tawuran, dan sebagainya.

Dalam kondisi seperti itu, sulit diharapkan stasiun-stasiun televisi raksasa tersebut akan memiliki kontribusi signifikan bagi demokratisasi di luar Jakarta.

2.3 Studi Analisis Isi Program Berita Televisi 2012

Untuk mengkonfirmasi pandangan tersebut, peneliti memaparkan bagian dari hasil penelitian tentang muatan berita stasiun televisi nasional komersial yang dilakukan pada 2012 lalu. Penelitian bertujuan mempelajari pola pemberitaan tentang peristiwa di Jakarta dan di luar Jakarta yang disajikan 10 stasiun televisi nasional (*RCTI, SCTV, Metro, TV One, Trans TV, Indosiar, Trans 7, ANTV, Global TV, dan MNC TV*). Kerangka waktu penelitian adalah pekan terakhir bulan April dan pekan pertama Mei 2012. Secara total, ada 3.502 berita yang diteliti. Sebagaimana akan ditunjukkan dalam empat tabel berikut, berita-berita tentang Indonesia yang disajikan memang memiliki nilai signifikansi rendah bagi kebutuhan informasi masyarakat di seluruh Indonesia.

Tabel 1 menunjukkan pola penyebaran daerah asal berita yang disajikan 10 stasiun televisi tersebut.

Tabel 1 secara jelas menunjukkan bahwa berita dari Jabodetabek dan Jawa mendominasi program berita yang disiarkan 10 stasiun televisi. Lebih dari 72% berita yang disaksikan seluruh masyarakat Indonesia adalah informasi mengenai apa yang terjadi di Jawa. Bahkan lebih spesifik lagi, hampir 40% adalah berita yang berasal dari Jabodetabek. Sebagai pembanding ekstrem, hanya 1,3% berita berasal dari Indonesia Timur.

Bagi penonton di Jakarta, gambaran ini mungkin tidak mengganggu. Tetapi ini

berarti bahwa seorang warga di Ambon – atau di Denpasar atau di Banjarmasin dan seterusnya -- hampir-hampir tak akan bisa melihat persoalan di daerahnya di layar televisi. Sekitar 40% berita yang disaksikannya adalah apa yang terjadi di Jabodetabek; sekitar 32% lainnya adalah tentang Jawa; sekitar 10% tentang Sumatra serta 8% tentang Sulawesi. Ini tentu tidak berarti warga Ambon tidak perlu mengetahui apa yang terjadi di daerah lain. Namun berita-berita mengenai daerah lain itu idealnya hanya bersifat sebagai pelengkap dari informasi yang sesungguhnya ia butuhkan, yaitu berita mengenai lingkungan terdekatnya.

Lebih lanjut, Tabel 2 menunjukkan kecenderungan tersebut berlaku secara merata di seluruh 10 stasiun televisi yang diteliti. Dapat dikatakan di hampir semua stasiun, sekitar 70-80% berita yang diudarakan adalah mengenai Jabodetabek dan Jawa. Berita-berita di luar Jawa menepati posisi minim. Di Trans TV misalnya bahkan tak ada satu pun berita mengenai Indonesia Timur dan di *Global TV* tak ada satu pun berita mengenai Kalimantan.

Tentu saja penjelasan sederhana dari gambaran ini adalah bahwa jumlah penonton luar Jawa (sebagaimana jumlah penduduk luar Jawa) adalah jauh lebih sedikit daripada penonton di Jawa. Namun, terkait dengan argumen penelitian ini, gambaran ini secara jelas menunjukkan masalah yang timbul akibat kondisi di mana stasiun televisi Jakarta tersebut melakukan siaran langsung yang seragam ke seluruh penonton di Indonesia. Karena yang diperlakukan sebagai khalayak adalah khalayak nasional, maka program yang disajikan tidak dapat dikemas sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah yang berbeda-beda. Program berita yang disajikan harus memuat materi yang dapat menarik penonton dengan beragam latar belakang daerah. Kebutuhan masyarakat akan informasi tentang lingkungan terdekatnya dengan demikian diabaikan.

Lebih jauh, Tabel 3 menunjukkan masalah-masalah apa saja yang disajikan dalam program berita yang disajikan oleh stasiun-stasiun televisi Jakarta tersebut bagi penontonya di seluruh Indonesia.

TABEL 1
DAERAH ASAL BERITA DALAM PROGRAM BERITA
10 STASIUN TELEVISI NASIONAL

Daerah	Persentase Item Berita (%)
Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek)	38,9%
Jawa, non-Jabodetabek	33,6%
Sumatra	10,2%
Sulawesi	8,1%
Kalimantan	3,2%
Bali dan Nusa Tenggara	4,7%
Indonesia Timur	1,3%
Total	100% (3.502 berita)

TABEL 2
DAERAH ASAL BERITA DALAM PROGRAM BERITA
DI SETIAP STASIUN TELEVISI NASIONAL

DAERAH	PERSENTASE ITEM BERITA DI SETIAP STASIUN TELEVISI NASIONAL (%)									
	RCTI	SCTV	MNC	Indosiar	Metro	TVOne	Trans	ANTV	Trans7	Global
Jakarta	47,4	46,6	50	34,8	49,4	39,4	33,2	21,9	27,1	51,9
Jawa,non-JKT	28,7	32,5	30,1	37,2	24,4	30,5	41,5	50,6	47,3	27,8
Sumatra	8,0	6,4	6,3	11,6	8,1	11,6	9,9	14,2	8,8	13,9
Sulawesi	6,2	7,7	5,3	5,3	9,3	9,9	6,3	3,2	8,1	2,5
Kalimantan	4,2	0,6	2,9	3,9	3,6	1,2	3,2	2,4	2,9	0
Bali & NT	4,8	4,9	3,9	5,3	3,9	5,7	5,9	5,3	4,0	2,5
Ind Timur	0,7	1,2	1,5	1,9	1,3	1,6	0	2,4	1,8	1,3
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sebaliknya, yang menempati persentase terbesar adalah berita tentang masalah-masalah sosial, hukum, kriminalitas, bencana dan kecelakaan. Sekitar 65% berita dari Jabodetabek adalah berita-berita yang masuk dalam kategori tersebut. Termasuk di dalamnya adalah berita tentang: tawuran warga, geng motor, pekerja seks komersial, pembunuhan, banjir atau tabrakan.

Bahkan kalau perhatian diberikan pada wilayah di luar Jabodetabek, persentase berita-berita yang masuk dalam kategori “berita negatif” tersebut semakin meningkat. Di Jawa luar Jabodetabek persentasenya mencapai 73,7%; Sumatra 82,7%; Sulawesi (87,3%); Kalimantan (73,1%); Bali dan Nusa Tenggara (79,9%), serta Indonesia Timur (52,2%).

Dengan demikian, bukan saja penonton di seluruh Indonesia tidak memperoleh berita tentang lingkungannya dalam jumlah yang memadai, namun berita-berita yang mereka konsumsi itupun lebih mengenai hal-hal sensasional yang tidak relevan dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Sebagai contoh, apa relevansi berita tentang pencurian, tabrakan atau tawuran di

Makasar bagi para penonton di luar Makasar?

3. Pembahasan

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang apa saja yang tersaji di program berita stasiun-stasiun televisi tersebut, penelitian menghadirkan rangkaian contoh dari lima program berita pagi dari lima stasiun televisi berbeda di hari yang sama (28 April 2012).

Kelima program televisi yang dipilih adalah: Metro Pagi (*Metro TV*), Kabar Pagi (*TV One*); Seputar Indonesia (*RCTI*), Reportase Pagi (*Trans TV*), dan Liputan 6 Pagi (*SCTV*). Yang dipilih hanyalah berita-berita tentang Indonesia, di luar berita olahraga. Dengan demikian, semua berita internasional tidak dianalisis, kecuali berita tentang peristiwa yang berlangsung di luar negeri namun memiliki relevansi dengan Indonesia. Contoh untuk kategori terakhir adalah berita tentang tewasnya Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia atau berita dipermalukannya para anggota DPR yang sedang melakukan kunjungan ke Melbourne.

TABEL 3
TOPIK BERITA BERDASARKAN DAERAH ASAL DALAM PROGRAM BERITA
10 STASIUN TELEVISI NASIONAL

DAERAH	PERSENTASE TOPIK BERITA DI PROGRAM BERITA (%)					
	Politik	Ekonomi	Budaya & Pendidikan	Masalah Sosial	Hukum, kriminal, bencana, kecelakaan	Lain-lain
Jakarta	14,3	2,4	9,4	31,0	34,9	8,1
Jawa, non-JKT	2,2	0,4	16,6	35,2	38,2	7,4
Sumatra	3,9	0,5	10,1	35,8	46,9	2,8
Sulawesi	2,8	0	7,5	54,5	32,8	2,4
Kalimantan	3,6	0	17	34,8	39,3	5,4
Bali & NTT	1,8	0	11	41,5	38,4	7,3
Ind Timur	2,3	0	20,4	38,6	13,6	25

TABEL 4
 ISI BERITA YANG DISAJIKAN DALAM PROGRAM BERITA PAGI
 DI LIMA STASUN TELEVISI NASIONAL, 28 APRIL 2012

METRO PAGI, 29 Berita	
Daerah	Isi berita
Jabodetabek	Angelina Sondakh ditahan (Jakarta, 5 berita); upaya bunuh diri (Jakarta); mobil terbakar (Jakarta); pesawat jatuh (Jakarta); nasib TKI; peluncuran SPBU BBM non-subsidi (Jakarta); Ariel Peter Pan bernyanyi di lapas (Jakarta), kecelakaan (Jakarta); kontroversi studi banding DPR (Jakarta/Berlin); lalu lintas; pembunuhan mahasiswi (Tangerang);
Jawa	Bentrok warga (Cilegon); debt collector dihajar massa (Sukabumi); anggota geng motor ditangkap (Semarang); upaya bunuh diri (Bandung); kondisi lalu lintas (Bandung); Rakorwil Partai Nasdem (Surabaya)
Sumatra	Pembunuhan sadis (Palembang); razia bocor (Medan)
Kalimantan	----
Sulawesi	Bentrok pemuda (Makasar); bentrok antar anggota Brimob dan Kostrad (Gorontalo, 2 berita)
Bali-NT	Penculikan anak (Denpasar); nasib TKI (Lombok)
Indonesia Timur	Bentrok warga (Maluku Tengah);
KABAR PAGI TV ONE, 32 Berita	
Daerah	Isi berita
Jabodetabek	Angelina Sondakh ditahan (Jakarta; 9 berita); TKI tewas di Malaysia (Jakarta, 3 berita); Kebocoran soal UN (Jakarta); mobil terbakar (Jakarta); bunuh diri (Jakarta); pesawat jatuh (Jakarta); SPBU meledak (Jakarta); rapat Golkar (Jakarta); pembangunan MRT (Jakarta), dua bocah tenggelam (Bekasi); pria tunawisma terserempet kereta rel listrik (Bekasi);
Jawa	Razia kos mesum (Tasikmalaya); tahanan tewas (Solo/Banyumas; 2 berita); perampokan toko emas (Magelang); kecelakaan bermain (Lamongan); demonstrasi di saat HUT Cilegon (Cilegon); penanganan lumpur Sidoarjo (Sidoarjo);
Sumatra	Sidang penganiayaan (Labuhan Batu);
Kalimantan	---
Sulawesi	Pasca bentrok Brimob vs Kostrad (Gorontalo)

Bali-NT	Kecelakaan (Kupang); TKI tewas (Lombok);
Indonesia Timur	---
SEPUTAR INDONESIA RCTI, 13 Berita	
Daerah	Isi berita
Jabodetabek	Angelina Sondakh ditahan (Jakarta, 3 berita); Mobil terbakar (Jakarta); Bus terbalik (Jakarta); Penanganan penyakit jantung (Jakarta); Program Jalinan kasih (Jakarta); Terapi Lumpur (Jakarta)
Jawa	Bayi ditelantarkan (Blitar); Demonstrasi buruh (Surabaya); Program Rantai Nusantara (Serang)
Sumatra	
Kalimantan	
Sulawesi	Konflik anggota Brimob dan Kostrad (Gorontalo)
Bali-NT	Dugaan penjualan organ (Lombok)
Ind. Timur	
REPORTASE PAGI TRANS TV, 19 Berita	
Daerah	Isi berita
Jabodetabek	Angelina Sondakh ditahan (Jakarta); TKI tewas di Malaysia (Jakarta); Studi banding anggota DPR (Jakarta/Berlin/Melbourne; 2 berita); pemusnahan alat bukti korupsi (Jakarta); debat Calon Gubernur DKI (Jakarta); razia PSK (Bogor);
Jawa	Kecelakaan lalu lintas (Semarang); pembunuhan mahasiswi (Tangerang); pembunuhan keji (Bojonegoro); bayi tersedak susu (Tasikmalaya); dugaan malpraktek (Cirebon); wisata edukatif Kampoeng Ilmu (Surabaya); kolektor keris (Surabaya); Downhill sepeda (Salatiga)
Sumatra	Pembunuhan mahasiswi (Palembang); longsor (Sibolga);
Kalimantan	Banjir rendam ribuan rumah (Samarinda);
Sulawesi	---
Bali-NT	Pemindahan imigran gelap (Sumbawa)
IndonesiaTimur	---

LIPUTAN 6 PAGI SCTV, 18 Berita	
Daerah	Isi berita
Jabodetabek	Angelina Sondakh ditahan (Jakarta, 3 berita); kasus tewasnya TKI di Malaysia (Jakarta, 2 berita); SPBU terbakar (Jakarta); SPBU BBM non-subsidi (Jakarta); mayat di dalam sungai (Jakarta); bus terbalik (Jakarta); Raja Karcis (Jakarta); murahny berdamai (Jakarta); laporan SCTV Award (Jakarta)
Jawa	Konser ricuh (Pati); kandidat Liputan 6 Award (Pasuruan);
Sumatra	Perjalanan membelah laut Bintan (Bintan)
Kalimantan	---
Sulawesi	---
Bali-NT	Tabrakan bus dan tronton (Kupang)
Ind. Timur	Bentrok warga (Maluku Tengah);

Tabel 4 menunjukkan bahwa stasiun-stasiun televisi nasional tidak dapat diharapkan menjadi sarana pemantau lingkungan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Ini bukan saja berarti masyarakat tidak dapat berharap akan memperoleh informasi cukup dari siaran televisi mengenai apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, namun juga tidak dapat berharap memperoleh informasi yang memang memiliki arti penting tentang lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Tabel tersebut menunjukkan dari berita tentang peristiwa yang berlangsung di Jakarta, hanya ada sejumlah berita yang memiliki signifikansi nasional. Beberapa yang penting dicatat adalah berita-berita mengenai dan terkait dengan penahanan Angelina Sondakh, kontroversi studi banding anggota DPR, dan nasib buruk yang menimpa TKI di Indonesia.

Ketiga berita tersebut disiarkan oleh seluruh stasiun televisi yang diteliti karena sejumlah alasan. Dalam derajat berbeda,

berita mengenai Angelina, studi banding DPR, dan nasib TKI menyangkut persoalan-persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia: korupsi berskala raksasa, tata kelola pemerintahan yang buruk, serta pengabaian nasib rakyat kecil. Persoalan-persoalan ini adalah masalah-masalah nyata dalam tata kelola pemerintahan yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, berita semacam ini dapat dikategorikan sebagai 'informasi penting' bukan karena daerah asal berita atau aspek sensasi, namun karena manfaatnya bagi masyarakat untuk bersikap dan terlibat dalam proses politik.

Masalahnya, berita-berita semacam itu menempati posisi tidak dominan. Pengamatan terhadap stasiun televisi berita maupun non-berita di atas menunjukkan bahwa mayoritas berita dari Jakarta maupun non-Jakarta bersifat lokal dan tak memiliki – atau hanya sedikit– signifikansi dengan kebutuhan informasi masyarakat sehari-hari.

Pengamatan secara lebih spesifik terhadap *Metro TV* dapat dijadikan contoh. Dalam berita mengenai Jakarta yang

disiarkan, selain ketiga berita besar yang sudah disebut, Metro Pagi menyajikan berita-berita mengenai upaya bunuh diri, mobil terbakar, pesawat jatuh, kecelakaan, pembunuhan mahasiswi, dan kondisi lalulintas di wilayah Jakarta.

Berita-berita terakhir ini tentu tidak dengan sendirinya tidak berarti bagi penonton di luar Jakarta. Seandainya peliputan peristiwa tersebut didalami tidak sekadar sebagai kejadian tunggal yang terlepas dari konteks sosial-budaya lebih luas, kasus-kasus itu dapat dipandang sebagai representasi masalah kemasyarakatan yang relevan bagi seluruh penonton di Indonesia. Masalahnya, pemberitaannya dilakukan secara parsial, sekadar sebagai berita kecelakaan dan berita kriminal biasa. Peristiwa-peristiwa tersebut jadinya hanya bersifat 'berita kota' yang relevan dengan penonton Jakarta.

Kecenderungan ini semakin terlihat dengan berita-berita Jawa non-Jakarta. Peristiwa-peristiwa di luar Jakarta yang disajikan *Metro TV* adalah hal-hal yang sangat lokal, seperti bentrok warga (Cilegon); debt collector dihajar massa (Sukabumi); anggota geng motor ditangkap (Semarang); upaya bunuh diri (Bandung); serta kondisi lalu lintas (Bandung). Satu-satunya berita yang mungkin memiliki signifikansi nasional adalah Rakorwil Partai Nasdem (Surabaya); namun itupun lebih bersifat propaganda partai yang dipimpin pemilik stasiun televisi.

Gambaran pemberitaan tentang apa yang terjadi di luar Jawa tak berbeda. *Metro TV* memberitakan pembunuhan di Palembang, razia di Medan, bentrok di Makasar, penculikan anak di Denpasar, bentrok warga Maluku Tengah, dan bentrok antar anggota Brimob dan Kostrad Gorontalo. Dari daftar peristiwa tersebut, sebenarnya sebagian dapat dianggap memiliki signifikansi sosial tinggi bagi penonton di daerah-daerah lain. Peristiwa bentrok di Maluku dan bentrok antara anggota Brimob dan Kostrad adalah dua contoh berita yang memiliki makna penting bagi penonton di sleuruh Indonesia. Masalahnya, pemberitaan tentang kedua

peristiwa itu disajikan secara singkat, parsial, dan tanpa penjelasan memadai tentang konteks dan latar-belakang peristiwa. Akibatnya, informasi yang disampaikan terkesan bersifat lokal.

Pola pemberitaan di *Metro TV* ini juga terlihat dalam program berita pagi di stasiun-stasiun televisi lain. Bahkan pola serupa juga terlihat dalam program-program berita siang dan malam, yang tersaji di stasiun-stasiun televisi komersial lain.

4. Kesimpulan

Tulisan ini menunjukkan bagaimana masyarakat di seluruh Indonesia nampaknya tak dapat mengandalkan program berita di stasiun-stasiun televisi nasional sebagai sumber informasi tentang hal-hal penting di lingkungan terdekatnya yang sebenarnya disyaratkan bagi terbangunnya demokrasi yang sehat di seluruh Indonesia.

Ini tidak berarti stasiun-stasiun televisi komersial di Indonesia tidak berfungsi sebagai agen demokratisasi. Stasiun-stasiun tersebut tentu berperan penting menyajikan apa yang berlangsung dalam ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Jakarta yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Stasiun televisi komersial Indonesia tentu berperan sebagai '*watchdog of the government*' sebagai sarana kontrol sosial, sebagai sarana diskusi dan komunikasi aktif untuk melengkapi masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan sebagai warga negara yang harus berpartisipasi dalam proses politik dari hari ke hari.

Namun demikian, stasiun televisi komersial tidak dapat berperan untuk memberdayakan masyarakat dalam proses demokratisasi di tingkat lokal. Ini menjadi persoalan serius mengingat dalam era desentralisasi yang berlangsung di Indonesia saat ini, masyarakat juga membutuhkan sarana kontrol sosial di tingkat lokal agar kekuatan politik yang tak lagi terpusat di tangan penguasa di Jakarta tak akan disalahgunakan untuk keuntungan-keuntungan yang bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat.

Stasiun televisi komersial nasional tersebut tak dapat diharapkan untuk menjalankan peran kontrol sosial dan kontrol sosial di tingkat lokal karena sistem penyiaran yang berpusat di Jakarta. Kalau saja, sebagaimana diamanatkan UU Penyiaran, sistem penyiaran yang diterapkan adalah sistem televisi berjaringan, akan tumbuh stasiun-stasiun televisi di setiap daerah yang dengan sendirinya akan juga menyajikan berita-berita yang terkait langsung dengan daerah-daerah wilayah operasi mereka, yang pada gilirannya, akan memungkinkan stasiun-stasiun tersebut menjalankan peran demokratisasi seperti yang diidealkan.

Pada intinya, stasiun-stasiun televisi nasional tersebut tak akan dapat menjalankan fungsi ideal tersebut karena khalayak yang harus dilayaninya adalah khalayak nasional. Negara-negara demokratis dengan wilayah luas seperti Amerika Serikat juga mengenal konsep stasiun dengan siaran nasional, namun itu dilakukan dengan menerapkan sistem televisi berjaringan. Dengan demikian muatan berita lokal sebuah stasiun televisi di sebuah kota (misalnya Los Angeles) yang merupakan afiliasi dari stasiun jaringan raksasa (misalnya *NBC*), akan berbeda dengan muatan berita lokal di stasiun afiliasi *NBC* di kota lain (misalnya New York). Di Indonesia, perbedaan muatan berita lokal dalam siaran *RCTI* yang dapat ditangkap di dua kota berbeda (misalnya Bandung dan Makasar) tidak dimungkinkan karena sifat siarannya yang sentralistik.

Sistem siaran televisi berjaringan ini sebenarnya sudah diamanatkan UU Penyiaran 2002. Sayangnya, terutama karena pertimbangan bisnis, stasiun-stasiun televisi raksasa di Jakarta berhasil memandulkan amanat UU tersebut. Pada analisis terakhir, pengabaian UU ini merugikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

5. Daftar Pustaka

Armando, Ade, 2014. "The Greedy Giants: Centralized television in post-

authoritarian Indonesia". *Gazette* 76 (4-5): h. 390-406.

_____. 2012. "Suara Lokal dalam Televisi Bersiaran Nasional". Laporan Penelitian Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Indonesia.

_____. 2011. *Televisi Jakarta di Atas Indonesia*. Jakarta: Bentang.

Davies AG. 2013. "Radio stations in Bogor, West Java, Indonesia". *Asiawaves*. <http://www.asiawaves.net/indonesia-local-tv.htm>

Hill DT and Sen K. 2007. *Media, Culture, and Politics in Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing.

Hollander E, d'Haenens L and Bardeel J. 2009. "Television performance in Indonesia: Steering between civil society and market". *Asian Journal of Communication* 19(1): 39–58.

Kitley P. 2000. *Television, Nation, and Culture in Indonesia*. Athens: Ohio University Press.

_____. ed. 2003. *Television, Regulation and Civil Society in Asia*. New York: Routledge Curzon.

Littlejohn S and Foss K. 2009. *Encyclopedia of Communication Theory*. Singapore: SAGE.

Nugroho Y, Putri DA and Laksmi S. 2012a. *Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia*. Jakarta: CIPG and HIVOS.

_____. 2012b. *Media and the Vulnerable in Indonesia: Accounts from the Margins*. Jakarta: CIPG and HIVOS.

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (2010). *Indonesia Media Guide*. Jakarta: P3I.